



Upaya Dedolarisasi BRICS dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Global dalam Pandangan Ekonomi Islam

Meisa Putri¹, Nurida Isnaeni², Aditya Pratama³

^{1,2,3} Universitas Jambi

*Corresponding author, email; meisaputri854@gmail.com ; nurida_isnaeni@unja.ac.id ;
adityapratama@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2025
Revised September 2025
Accepted December 2025
Available online
<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Dedolarisasi, BRICS, Ekonomi Global, Ekonomi Islam

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Meisa Putri, Nurida Isnaeni, Aditya Pratama" Upaya Dedolarisasi BRICS dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Global dalam Pandangan Ekonomi Islam " *Journal of Sharia Economics* 7, No. 2 Dec: 2025

ABSTRACT

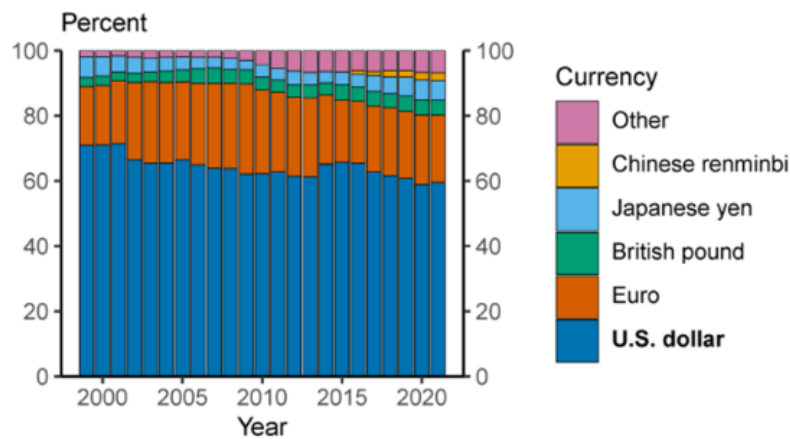
In the global financial system, the dominance of the United States Dollar (USD) has created a structural dependency on a single currency, prompting the BRICS countries (Brazil, Rusia, India, China, and South Africa) to initiate dedollarization efforts. This study aims to analyze the dedollarization strategies undertaken by BRICS and to examine their implications through the lens of Islamic economics. Using a qualitative descriptive method with a literature based approach, this research employs secondary data obtained from academic journal, BRICS reports, credible economic new sources, and official press releases. The data were analyzed using a structured meta-analysis approach to identify patterns, similarities, and the strategic relevance of BRICS dedollarization strategies implemented by BRICS: Local Currency Settlement (LCS), New Development Bank (NDB), Contingent Reserve Arrangement (CRA), Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), and the Belt and Road Initiative (BRI). These strategies align with Islamic economic principles such as justice (al-'adl), public interest (maslahah), cooperation (ta'awun), stability (istiqrar), and efficiency (itqam). From an Islamic economic perspective, dedollarization represents not merely an economic policy alternative but a transformative effort toward a more equitable, ethical, and sustainable global monetary system.

A. Pendahuluan

Dalam konteks perdagangan internasional, Dolar Amerika Serikat (USD) berperan sebagai mata uang acuan utama dalam sistem nilai tukar global. Dominasi ini berakar pada faktor-faktor historis dan kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Sebelumnya, posisi tersebut dipegang oleh Inggris melalui pound sterling, namun Inggris terpaksa meninggalkan sistem standar emas pada tahun 1931 akibat kebutuhan untuk melakukan pinjaman finansial (Teslya & Podolskaya, 2020). Dolar AS secara resmi diakui sebagai mata uang cadangan internasional untuk pertama kalinya sejak berakhirnya Perang Dunia II, melalui

Perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944 di New Hampshire yang diikuti oleh 44 negara, yang menetapkan bahwa mata uang global akan dikaitkan dengan Dolar AS yang didukung oleh cadangan emas (UnairNews, 2023). Cadangan emas Amerika Serikat pada periode tersebut tercatat mencapai 70% dari keseluruhan cadangan emas dunia setelah Perang Dunia II. Dalam situasi ini, Amerika Serikat mengambil peran sebagai pemegang standar moneter internasional berdasarkan kesepakatan Bretton Woods (Federal Reserve Bank of Atlanta, 2013).

Keberadaan dolar AS sebagai mata uang cadangan utama memberikan keyakinan bagi negara-negara lain untuk menggunakannya dalam transaksi internasional karena stabilitas dan likuiditasnya yang tinggi (UnairNews, 2023). Pada tahun 2021, dolar AS menguasai 60% dari total cadangan devisa resmi dunia. Meskipun proporsi ini menurun dari 71% pada tahun 2000, dolar AS masih jauh mengungguli mata uang lain seperti euro (21%), yen (6%), pound sterling (5%), dan renminbi (2%) (Bertaut et al., 2021).



Gambar 1. Porsi cadangan devisa (IMF, 2024)

Walau memiliki keunggulan, dolar AS tidak terhindar dari kelemahan sebagai mata uang standar. Sama seperti negara-negara lain yang sangat tergantung pada stabilitas ekonomi AS, mereka juga akan menghadapi kendala apabila ekonomi AS mengalami guncangan. Dampak dari kondisi tersebut bisa meluas ke seluruh dunia, termasuk terjadinya fluktuasi nilai tukar yang signifikan (D'Arista, 2004). Penelitian oleh (Siddiqui, 2020) menunjukkan bahwa saat dolar menguat, negara-negara yang terkait dengan dolar akan memiliki utang dalam mata uang tersebut akan mengalami peningkatan beban karena nilai utang menjadi lebih tinggi dan mahal, sebaliknya ketika dolar melemah maka harga barang impor AS menjadi lebih murah yang berpotensi memicu inflasi di negara berkembang yang sangat bergantung pada impor dari AS.

Untuk mengurangi ketergantungan mata uang tertentu, dibutuhkan organisasi khusus yang mendorong dedolarisasi. BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih mandiri (BRICS, 2009). Konsep BRIC diajukan oleh ekonom Jim O'Neill dari Goldman Sachs pada 2001, kemudian Afrika Selatan bergabung pada 2010 sehingga aliansi berubah menjadi BRICS. pertemuan resmi pertama diadakan pada 2006, dan sejak 2009 BRICS rutin menggelar KTT tahunan untuk membahas isu ekonomi dan geopolitik (O'Neill, 2001). Pembahasan mengenai dominasi dolar AS dan upaya pembentukan aliansi oleh negara-negara BRICS untuk melakukan dedolarisasi telah mengga,barkan sebuah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang kompleks. Dominasi dolar selama ini bukan hanya sebagai alat pembayaran internasional, tetapi juga simbol kekuatan politik dan ekonomi Amerika Serikat yang memengaruhi arus keuangan global (Subramanian, 2011). Namun, fenomena ini mulai menghadapi tantangan dari negara-negara BRICS yang menginisiasi langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar dalam perdagangan dan pembiayaan internasional. Pembentukan aliansi dedolarisasi ini mencerminkan usaha kolektif dalam mencari alternatif sistem moneter global yang lebih berimbang dan adil, terutama di tengah gejolak ekonomi dan politik yang semakin kompleks (Ilyinsky & Magamedov, 2023).

Peralihan perhatian dari strategi geopolitik dan ekonomi ke kerangka pemikiran ekonomi Islam menjadi sangat relevan dalam konteks dedolarisasi BRICS. Ekonomi Islam menawarkan landasan alternatif yang tidak hanya menekankan aspek moneteris semata, tetapi juga integrasi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam tatanan ekonomi (Chapra, 2008). Prinsip-prinsip seperti larangan riba, keharusan transaksi yang transparan, serta pembagian risiko dan manfaat secara adil, dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan stabil (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Dengan demikian, menghubungkan upaya dedolarisasi BRICS dengan perspektif ekonomi Islam membuka ruang diskusi yang lebih luas, tidak sekedar soal diversifikasi mata uang atau penyusunan mekanisme perdagangan baru, melainkan juga tentang bagaimana sistem moneter dan keuangan global dapat diatur berdasarkan prinsip yang mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan universal. Pendekatan ekonomi Islam ini sejalan dengan harapan banyak negara berkembang untuk menciptakan tatanan ekonomi dunia yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai moral yang kuat.

B. Landasan Teori

1. Ekonomi Moneter

Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang dijalankan oleh otoritas moneter atau bank sentral guna mengendalikan jumlah uang yang beredar dan atau tingkat suku bunga dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan dalam aktivitas ekonomi. Secara fundamental, tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga keseimbangan ekonomi baik di dalam negeri maupun di tingkat eksternal (Astuty et al., 2019). Dalam sistem ekonomi, uang memainkan peran penting, terutama dalam kerangka teori ekonomi moneter. Menurut (Marzuki, 2018) uang berperan sebagai sarana pertukaran yang memudahkan kegiatan perdagangan dan menyederhanakan proses tukar-menukar barang. Selain itu, uang juga berfungsi sebagai ukuran nilai, yang membandingkan penetapan harga untuk barang sejenis dan menjadi acuan dalam membandingkan harga antara barang yang berbeda. Uang juga memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai, sehingga individu dapat mempertahankan kekayaan mereka dalam bentuk uang maupun barang.

2. Ekonomi Moneter Islam

Sistem ekonomi Islam menggariskan bahwa distribusi harus berlandaskan pada dua prinsip utama, yaitu kebebasan dan keadilan. Dalam hal ini, kebebasan berarti bertindak sesuai dengan nilai-nilai tauhid dan keadilan, yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang membolehkan individu bertindak tanpa batasan dari campu tangan eksternal (Tahkim, 2016). Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam memainkan peran krusial dalam menopang sistem moneter yang adil dan berkelanjutan. Terdapat lima nilai universal yang menjadi landasan konseptual dalam membangun teori ekonomi Islam, yaitu tauhid (iman), 'adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil atau akuntabilitas) (Handayani, 2018).

Tujuan utama kebijakan moneter dalam perspektif Islam, yaitu menjaga kestabilan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menstabilkan harga, dan mendorong pertumbuhan yang merata, sangat penting dalam situasi ekonomi saat ini. Kebijakan moneter Islam berfokus pada pencapaian kestabilan ekonomi melalui pengelolaan pasokan uang yang tidak merugikan masyarakat. Salah satu cara utama untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melarang riba, yang berfungsi menghindari praktik bunga tinggi yang sering dianggap sebagai penyebab utama inflasi (Sari & Indrabudiman, 2024).

3. Dedolarisasi

Dedolarisasi merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dalam perdagangan tradisional. Dedolarisasi mengacu pada upaya penggantian USD, yang umum digunakan dalam

perdagangan global, dengan mata uang lokal atau alternatif. Tujuan utamanya adalah untuk memitigasi risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar dolar dan meningkatkan stabilitas ekonomi nasional (Diah, 2023). Sejak penandatanganan Perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944, dominasi dolar AS secara historis mulai terbentuk, ketika berbagai negara di dunia menetapkan dolar AS sebagai mata uang cadangan mereka. Pada masa itu, Amerika Serikat yang menyimpan cadangan emas terbesar, mengaitkan nilai dolar dengan emas.

Fenomena dedolarisasi tercermin dalam menurunnya porsi aset berdenominasi USD dalam cadangan devisa agregat yang dimiliki bank sentral global. Penggunaan USD dalam cadangan global turun dari 73% pada tahun 2001 menjadi 55% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, angka ini semakin menurun menjadi 47%. Penurunan ini terjadi karena beberapa negara memilih mata uang lain dalam transaksi perdagangan, sehingga mengurangi porsi USD dalam komposisi cadangan devisa global sepanjang tahun 2022 (Kamil & Muhammad Rasyid Ridlo, 2023).

4. BRICS

BRICS adalah koalisi negara-negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik antarnegara berkembang. Konsep BRICS berawal dari seorang ekonom di Goldman Sachs, Jim O'Neill, yang menciptakan akronim "BRIC" pada tahun 2001. Dalam makalahnya, O'Neill memprediksi bahwa Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok akan menjadi kekuatan ekonomi utama yang mampu mendominasi ekonomi global pada tahun 2050. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara ini akan membentuk kembali tatanan global yang ada (Kurniawan, 2024b).

Pertemuan resmi pertama para menteri luar negeri BRICS berlangsung pada tanggal 20 September 2006, di New York City, di sela-sela Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-61. Pertemuan tersebut, yang diprakarsai oleh Presiden Rusia saat itu Vladimir Putin, dihadiri oleh para menteri luar negeri Brasil, Rusia, India, dan Cina. Selama pertemuan ini, negara-negara sepakat untuk memperkuat kerja sama multilateral dan secara kolektif mengatasi tantangan global (O'Neill, 2001). Dalam KTT BRIC perdana diadakan pada tanggal 16 Juni 2009, di Yekaterinburg, Rusia, di mana para pemimpin dari keempat negara anggota mengeluarkan pernyataan bersama yang menggarisbawahi pentingnya kerja sama dalam menanggapi krisis keuangan global dan dalam mereformasi lembaga keuangan internasional (Kurniawan, 2024a). Pada tahun 2010, Afrika Selatan secara resmi bergabung dengan kelompok tersebut, yang mengarah pada penggantian nama organisasi menjadi BRICS (Kahn, 2011).

Negara-negara BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, berkontribusi signifikan terhadap PDB global. Menurut World Economic Outlook edisi Oktober 2024 yang diterbitkan oleh IMF dengan judul "*Policy Pivot, Rising Threats*", Tiongkok merupakan kontributor terbesar dalam kelompok tersebut, dengan kontribusi sekitar 22% dari PDB global. Angka ini mencerminkan kekuatan ekonomi Tiongkok, yang melampaui gabungan ekonomi semua negara G7. India juga telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, dengan pangsa pasarnya meningkat dari 4% pada tahun 2000 menjadi 7% saat ini, yang menunjukkan kemajuan ekonomi yang pesat dan peran strategis yang semakin besar di panggung internasional (IMF, 2024).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian berbasis literatur. Data dikumpulkan melalui tinjauan ekstensif terhadap literatur ilmiah, laporan kelembagaan, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan dedolarisasi BRICS serta peran potensialnya dalam transformasi sistem moneter global. Model konseptual yang dikembangkan dalam studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pandangan ekonomi Islam terkait strategi dan implikasi dedolarisasi yang diinisiasi oleh BRICS. Data yang digunakan berasal dari tinjauan pustaka yang mendalam terhadap sumber-sumber kredibel dan terpercaya, meliputi laporan resmi *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, bank sentral negara-negara anggota BRICS, serta situs resmi BRICS, artikel jurnal akademik terpilih, dan laporan berita yang membahas dedolarisasi serta peran BRICS dalam sistem moneter global.

Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan meta-analisis terstruktur untuk mengevaluasi strategi dedolarisasi BRICS dalam kerangka ekonomi Islam, dengan fokus pada kontribusinya terhadap transformasi sistem moneter global. Tahap awal penelitian mencakup tinjauan komprehensif terhadap literatur akademik, dokumen kebijakan, reformasi moneter internasional, serta prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Melalui proses tinjauan tersebut, berbagai tema konseptual diidentifikasi yang mempresentasikan aspek-aspek esensial dedolarisasi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis secara sistematis dan direstrukturisasi menjadi sejumlah faktor inti yang dianggap paling relevan dengan pandangan ekonomi Islam. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai kontribusi dedolarisasi BRICS dalam konteks prinsip ekonomi Islam dan dampaknya terhadap pergeseran sistem moneter global.

Diskusi / Pembahasan

1. Strategi dedolarisasi BRICS

Dedolarisasi menjadi agenda strategis bagi BRICS dalam membentuk tatanan keuangan global yang lebih seimbang dan multipolar. Upaya ini diwujudkan melalui beragam kebijakan yang bertujuan mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan, investasi, dan cadangan devisa internasional. Bagian ini membahas secara sistematis berbagai strategi dedolarisasi yang dikembangkan oleh BRICS, baik melalui instrumen kelembagaan, kebijakan moneter, maupun inisiatif kerja sama lintas sektor. Berbagai strategi dedolarisasi tersebut adalah:

a) *Local Currency Settlement (LCS)*

Merupakan sebuah mekanisme transaksi lintas negara yang memungkinkan penggunaan mata uang domestik dalam pembayaran dan penyelesaian perdagangan, tanpa ketergantungan pada dolar AS sebagai mata uang perantara. Inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi transaksi, menurunkan biaya yang terkait dengan konversi mata uang, serta memperkuat stabilitas ekonomi negara-negara peserta (Ito, 2021). Secara global, munculnya LCS merupakan reaksi terhadap dominasi dolar AS dalam sistem keuangan internasional. Dengan melakukan transaksi menggunakan mata uang lokal, negara-negara dapat menghindari biaya konversi ganda yang biasanya timbul saat menukar mata uang lokal ke dolar AS, sehingga membantu negara-negara menjaga stabilitas ekonomi domestik mereka. Penggunaan mata uang domestik dalam perdagangan internasional juga memberikan kontrol yang lebih besar terhadap kebijakan moneter nasional (Wardhono et al., 2023).

Penggunaan LCS memberikan sejumlah manfaat langsung kepada pelaku usaha, termasuk: (i) efisiensi biaya konversi transaksi valuta asing, (ii) alternatif pembiayaan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang lokal, (iii) alternatif instrumen lindung nilai dalam mata uang lokal, dan (iv) diversifikasi eksposur mata uang dalam penyelesaian transaksi internasional (Bank Indonesia, 2021). Untuk menerapkan kebijakan *Local Currency Settlement (LCS)*, suatu negara harus memenuhi beberapa persyaratan utama, baik dari segi regulasi, infrastruktur perbankan, maupun kerja sama bilateral. Menurut (Bank Indonesia, 2020), melalui Peraturan BI Nomor 22/12/PBI/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank, LCS hanya dapat diimplementasikan jika terdapat *Memorandum of Understanding (MoU)* antara otoritas keuangan kedua negara, seperti bank sentral atau kementerian keuangan. Tanpa

kesepakatan formal maka LCS tidak dapat dilakukan. Selain itu, negara juga harus memiliki bank yang ditunjuk sebagai ACCD untuk memfasilitasi transaksi LCS. Syarat selanjutnya, negara harus memiliki kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan LCS, termasuk Peraturan Bank Sentral, dan petunjuk operasional (Operating Guidelines/OG). Agar LCS berjalan dengan lancar, negara juga harus memiliki sistem kliring dan penyelesaian transaksi yang efisien antar-bank, akses pasar valuta asing (Forex) untuk memfasilitasi konversi langsung antar mata uang lokal tanpa perantara USD.

b) New Development Bank (NDB)

Ide pendirian bank ini pertama kali diajukan oleh India pada KTT BRICS ke-4 tahun 2012 di Delhi. Pembentukan *New Development Bank* (NDB) secara resmi disahkan melalui *Agreement on the New Development Bank* yang ditandatangani pada 25 Juli 2014 saat KTT BRICS ke-6 di Fortaleza, Brazil, dan mulai beroperasi sejak 21 Juli 2015 dengan kantor pusat berada di Shanghai, China. NDB dibentuk dengan tujuan utama mengatasi kekurangan pembiayaan infrastruktur serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menurut laporan strategi NDB periode 2022-2026 (New Development Bank, n.d.), diperkirakan terdapat kesenjangan pembiayaan infrastruktur hampir USD 12 triliun di negara-negara pasar berkembang dan berkembang antara tahun 2021 hingga 2030. Selain itu, NDB bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat peran lembaga keuangan multilateral yang sudah ada dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan global, khususnya bagi negara-negara berkembang. Landasan pendirian NDB juga mencakup keinginan mempererat kerja sama ekonomi antar negara BRICS serta menyediakan instrumen nyata untuk memperkuat posisi mereka dalam tatanan ekonomi dunia (Rau's IAS Study Circle, 2024).

NDB memberikan dukungan keuangan berupa pinjaman, jaminan, partisipasi ekuitas, dan instrumen lain kepada proyek-proyek publik maupun swasta yang fokus pada pembangunan berkelanjutan. Selain fungsi pembiayaan, NDB juga bertindak sebagai katalisator inovasi serta pertukaran pengetahuan antara anggota dan mitra, guna meningkatkan nilai tambah pembangunan dan penerapan praktik terbaik. Dalam lima tahun pertama beroperasi, NDB menyetujui 70 proyek senilai USD 25,07 miliar untuk infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Strategi untuk 2022-2026 menargetkan menjadi

penyedia utama solusi infrastruktur di EMDCs dengan fokus pada mobilisasi sumber daya dan pembangunan inklusif (New Development Bank, 2022). Berdasarkan informasi dari situs resmi New Development Bank (New Development Bank, n.d.), hingga 31 Desember 2024, total pembiayaan yang disetujui mencapai 39 miliar dolar AS untuk 120 proyek. Proyek tersebut meliputi pembangunan 40.400 km jalan, 35.000 unit rumah, 1.400 km terowongan atau kanal air, peningkatan kapasitas air minum sebesar 288.800 m³/hari, pengolahan limbah 612.200 m³/hari, pembangunan 293 km jaringan kereta api perkotaan, 43 sekolah, serta peningkatan kapasitas penumpang udara menjadi 104 juta orang per tahun. Selain itu, NDB berkomitmen menjaga lingkungan dengan mengurangi emisi karbon sebesar 14,7 juta ton per tahun dan membangun pembangkit energi terbarukan berkapasitas 2.400 MW.

c) *Contingent Reserves Arrangement (CRA)*

BRICS membentuk *Contingent Reserve Arrangement* (CRA) untuk mengurangi ketergantungan negara berkembang pada USD dan lembaga keuangan Amerika seperti IMF dan *World Bank*, sehingga meningkatkan kemandirian dalam menghadapi krisis keuangan. Inisiatif ini dimulai pada KTT BRICS ke-6 di Fortaleza, Brazil, pada Juli 2014, bersamaan dengan pendirian *New Development Bank* (NDB). Deklarasi Fortaleza menyatakan bahwa CRA berfungsi sebagai pelengkap sistem keuangan internasional yang telah ada, bukan sebagai pengganti. Perjanjian CRA mulai berlaku setelah diratifikasi oleh semua anggota dan diumumkan pada KTT BRICS ke-7 Juli 2015 (BRICS, 2024).

Tujuan utama pembentukan CRA adalah untuk melindungi negara-negara BRICS dari tekanan likuiditas global yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, terutama saat krisis keuangan internasional. CRA bertujuan mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan global yang dipimpin oleh negara maju dan memperkuat posisi ekonomi negara berkembang dalam sistem keuangan dunia (TORONTO, 2024). Dalam sistem keuangan internasional, CRA berfungsi sebagai jaring pengaman tambahan bagi negara-negara BRICS yang sering mengalami kesulitan akses dana darurat dari lembaga seperti IMF.

Menurut halaman resmi BRICS (BRICS, 2024) Dana awal pembentukan CRA yaitu sebanyak 100 miliar USD yang berasal dari kontribusi anggota BRICS, dimana China menyumbang sebanyak \$41 miliar, Brazil \$18 miliar, Rusia \$18 miliar, India \$18 miliar, dan Afrika Selatan

\$5 miliar. Setiap anggota memiliki batas pinjaman maksimum berdasarkan kontribusinya, yakni China \$21 miliar, Brazil \$18 miliar, Rusia \$18 miliar, India \$18 miliar, dan Afrika Selatan \$10 miliar. Meskipun china memberikan kontribusi terbesar, akses pinjamannya hanya setengah dari kontribusi, sedangkan Afrika Selatan bisa meminjam dua kali lipat dari yang di setorkan. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi negara ekonomi kecil untuk mengakses dana lebih banyak saat darurat, sementara negara besar seperti China memiliki batas akses lebih rendah karena cadangan devisanya yang lebih besar dari ketergantungannya yang lebih rendah pada CRA.

d) *Cross-border International Payment System (CIPS)*

Untuk mewujudkan dedolarisasi, perlu mencari alternatif pengganti SWIFT dan menghindari bank serta lembaga kliring Barat. SWIFT, yang didirikan pada 1970-an di Belgia oleh 239 bank dari 15 negara, berfungsi sebagai jaringan komunikasi pembayaran internasional. Alternatif terbaik adalah menciptakan jaringan global baru yang lebih baik dari SWIFT (Swift, n.d.). Sebagai jawabannya, China meluncurkan CIPS (Cross-border International Payment System), didukung oleh bank besar dan lembaga kliring sendiri untuk transaksi lintas negara, sekaligus mendorong penggunaan mata uang renminbi (RMB) secara internasional.

CIPS (*Cross-border Interbank Payment System*) adalah sistem pembayaran lintas batas yang dikembangkan oleh *People's Bank of China* sejak 2012 dan diluncurkan pada Oktober 2015 untuk memfasilitasi transaksi mata uang Renminbi (RMB) secara efisien dan aman (CIPS, n.d.-a). Sistem ini menyediakan layanan kliring dan penyelesaian pembayaran RMB dengan biaya rendah, dan telah beroperasi stabil dengan ketersediaan penuh sejak peluncurannya. Peserta CIPS terus bertambah signifikan, dari 33 peserta langsung dan 903 tidak langsung pada 2019, menjangkau lebih dari 3.000 lembaga di 167 negara. Pada 2023, CIPS memproses lebih dari 6,6 juta transaksi senilai 123,06 triliun RMB, meningkat pesat dibanding tahun sebelumnya. Hingga Maret 2025, jumlah peserta sudah mencapai 170 langsung dan 1.497 tidak langsung di 119 negara, melibatkan lebih dari 4.900 institusi perbankan (CIPS, n.d.-b). CIPS menggunakan standar internasional seperti ISO 20022, mendukung karakter China, dan berfungsi sebagai alternatif yang kuat untuk sistem pembayaran global yang dikuasai SWIFT.

CIPS menghadirkan alternatif terpercaya untuk sistem pembayaran global yang selama ini didominasi SWIFT. Dengan teknologi *Real-Time Gross Settlement* (RTGS), CIPS memungkinkan proses transaksi yang cepat, langsung, dan aman, sehingga mengurangi risiko keterlambatan dan ketidakpastian. Sistem ini juga memperluas jam operasional dengan melibatkan lembaga keuangan internasional di luar zona waktu Tiongkok, meningkatkan efisiensi dan cakupan global. Selain itu, CIPS mendukung inisiatif besar seperti *Belt and Road Initiative* (BRI) dengan memfasilitasi pendanaan proyek infrastruktur lintas negara, contohnya koridor ekonomi China-Pakistan dan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem dan mata uang Barat (Ozanne, 2024).

e) *Belt and Road Initiative (BRI)*

China yang merupakan bagian dari BRICS juga membangun alternatif lain guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar dan inisiatif untuk menginternasionalisasikan RMB nya, terbukti dengan pembentukan Inisiatif Sabuk dan Jalan atau dikenal dengan *Belt and Road Initiative* (BRI). BRI adalah kebijakan global yang dicanangkan oleh Presiden China, Xi Jinping, pada 2013 untuk memperkuat konektivitas dan kerja sama ekonomi antara China dengan negara-negara di Asia, Eropa, Afrika, dan Oseania. Melalui pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan investasi lintas negara, BRI bertujuan meningkatkan pengaruh global China serta mengamankan pasokan energi dan sumber daya. Inisiatif ini terinspirasi oleh jalur sutra kuno dan terdiri dari dua jalur utama, yaitu *Silk Road Economic Belt* (jalur darat) dan *21st Century Maritime Silk Road* (jalur laut), yang menghubungkan China dengan berbagai kawasan di dunia melalui jaringan ekonomi dan infrastruktur (Ohashi, 2018).

Dalam situs resmi yang dikeluarkan oleh (The People's Bank Of China, 2019), BRI disebut sebagai upaya bersama untuk membangun konektivitas dan kerjasama di antara negara-negara peserta melalui koordinasi kebijakan, pembangunan infrastruktur, perdagangan bebas hambatan, integrasi keuangan, dan penguatan hubungan antar masyarakat (*people to people bonds*). BRI pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping pada 7 September 2013 di Kazakhstan melalui konsep *Silk Road Economic Belt* yang bertujuan mempererat kerja sama ekonomi China dengan negara-negara Eurasia. Sebulan kemudian, pada 3 Oktober 2013, Xi Jinping meluncurkan *21st Century*

Maritime Silk Road di parlemen Indonesia untuk meningkatkan konektivitas maritim antara China dengan Asia Tenggara, Afrika Timur, dan Timur Tengah. Sejak itu, inisiatif ini berkembang pesat menjadi salah satu kebijakan luar negeri dan ekonomi utama China. Menurut *World Economic Forum*, BRI melibatkan lebih dari 150 negara dan organisasi serta investasi lebih dari 1 triliun USD. Pemerintah China membentuk kelompok kerja khusus untuk mengelola BRI dan pada 2015 mengeluarkan dokumen visi dan aksi sebagai pedoman pelaksanaan.

Menurut laporan resmi (The People's Bank Of China, 2019) *Silk Road Economic Belt* adalah koridor ekonomi darat yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Eropa, meliputi enam koridor utama seperti New Eurasian Land Bridge dan China-Pakistan Economic Corridor. Menurut (China Economic Information Service, n.d.), koridor ini melibatkan lebih dari 20 negara, termasuk Kazakhstan, Rusia, Iran, Turki, dan Pakistan, dengan panjang lebih dari 8.000 km, menghubungkan pusat ekonomi penting di Eurasia. Salah satu jalur utama, China-Pakistan *Economic Corridor* (CPEC), membentang 3.000 km dari Kashgar ke Gwadar, melibatkan pembangunan jalan raya, pembangkit listrik, dan pengelolaan Pelabuhan Gwadar oleh China selama 40 tahun. Koridor Asia Tengah juga terdiri dari lima negara dengan populasi 72 juta dan PDB gabungan sebesar 291 miliar dolar AS. Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 adalah rute perdagangan laut yang menghubungkan Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Timur, dan Eropa, dengan panjang lebih dari 15.000 km dan melibatkan lebih dari 10 pelabuhan utama seperti Shanghai, Jakarta, Colombo, Mombasa, dan Suez sebagai pusat perdagangan global. China juga menginvestasikan infrastruktur maritim besar, termasuk pengelolaan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka selama 99 tahun dengan nilai investasi \$1,12 miliar, serta pelabuhan Kyaukpyu di Myanmar yang disewa selama 50 tahun untuk akses ke Teluk Benggala. Sekitar 80% perdagangan maritim China melewati Selat Malaka, menjadikan Singapura dan Kuala Lumpur sebagai titik-titik strategis penting.

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh (The Belt Council Information Office Of The People's Republic of China, 2023), menyatakan bahwa BRI telah membangun 3.000 km rel kereta api baru, termasuk jalur Jakarta-Bandung, dan 20.000 km jalan raya di 60 negara dengan investasi \$4-8 triliun yang ditargetkan selesai pada 2049. Di sektor

energi, proyek BRI mencakup PLTU di Pakistan dengan kapasitas 4.620 MW dan pipa gas China-Myanmar sepanjang 2.520 km yang mengalirkan 12 miliar m³ gas per tahun. Di bidang transportasi, koridor kereta Chongqing-Duisburg memangkas waktu pengiriman dari 36 menjadi 13 hari, serta pelabuhan Gwadar meningkatkan kapasitas kargo menjadi 300 juta ton per tahun. Di sektor ekonomi digital, ada investasi \$500 juta untuk kabel bawah laut PEACE sepanjang 15.000 km dan proyek "*Digital Silk Road*" dengan 34 satelit komunikasi yang menjangkau 60 negara. Bank Dunia memperkirakan BRI bisa menaikkan perdagangan global 4,1%, menurunkan biaya logistik 1,1-2,2%, dan mendorong pertumbuhan PDB tahunan 2,6-3,9% di Asia Timur. Selain itu, standar hijau diterapkan pada 35% proyek infrastruktur sejak 2021 untuk menjaga keberlanjutan.

2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Upaya Dedolarisasi BRICS

Transisi menuju dedolarisasi oleh blok BRICS menimbulkan perhatian penting dari berbagai perspektif ekonomi, termasuk pandangan ekonomi Islam yang menilai implikasi keuangan dan sosial dari pengurangan dominasi dolar AS. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan menjadi dasar penting untuk menganalisis inisiatif dedolarisasi ini (Kamil & Muhammad Rasyid Ridlo, 2023). BRICS sebagai kelompok negara berkembang dengan kekuatan ekonomi signifikan berusaha mengembangkan sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif, yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Menghadirkan alternatif terhadap dolar AS tidak hanya soal geopolitik dan ekonomi, tetapi juga bisa menjadi upaya untuk membentuk tatanan ekonomi global yang lebih etis dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Kornitasari et al., 2023).

Dari sudut pandang ekonomi moneter Islam, dominasi dolar Amerika telah memunculkan ketidakadilan struktural karena memberikan keuntungan besar bagi negara yang mengedarkan mata uang tersebut, sekaligus menimbulkan kerentanan bagi negara lain yang tergantung pada sistem moneter ini (Enfu & Chunyi, 2023). Oleh karena itu, langkah BRICS dalam mengembangkan alternatif sistem keuangan yang lebih mandiri dan berkeadilan dapat dilihat sebagai respons positif terhadap kritik Islam terhadap hegemoni dolar AS. Inisiatif ini menekankan pentingnya kemandirian ekonomi, stabilitas nilai tukar, dan distribusi kekayaan yang lebih merata, yang merupakan bagian dari etika ekonomi Islam yang mengedepankan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam hubungan ekonomi internasional (Syaifullah, 2024).

Lebih jauh, kolaborasi antara kekuatan ekonomi BRICS dengan prinsip-prinsip keuangan Islam membuka peluang untuk menciptakan sistem keuangan

global baru yang tidak hanya fokus pada efisiensi dan kekuatan pasar, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekonomi yang menyeluruh. Sistem ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi antar negara anggota BRICS dan juga negara-negara Muslim, membuka akses keuangan yang lebih inklusif, serta memperbaiki struktur ekonomi dunia yang selama ini dianggap timpang (Syaifullah, 2024). Secara konseptual, ini adalah implementasi nyata dari ide ekonomi Islam yang ingin menyeimbangkan tujuan materi dan moral dalam pembangunan ekonomi global yang adil dan berkelanjutan.

Tabel 1. Perbandingan Strategi dedolarisasi BRICS dan Prinsip Ekonomi Islam

| No | Strategi Dedolarisasi BRICS | Tujuan dan Dampak | Nilai Ekonomi Islam yang Relevan | Analisis Keterkaitan |
|----|--|---|--|---|
| 1 | <i>Local Currency Settlement</i> (LCS) | Mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional, menekan biaya transaksi, dan memperkuat stabilitas nilai tukar antarnegara | Keadilan (<i>al-'adl</i>) dan kemaslahatan (<i>maslahah</i>) | Penggunaan mata uang lokal menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil karena menghindari dominasi satu mata uang global. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahtan dalam islam yang menolak praktik ekonomi eksploitatif dan mendorong stabilitas perdagangan |
| 2 | <i>New Development Bank</i> (NDB) | Menyediakan pembiayaan pembangunan bagi negara anggota tanpa | Kerjasama (<i>ta'awun</i>) dan keadilan distributif | Prinsip kerjasama dalam pendanaan proyek pembangunan memperkuat |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | ketergantungan pada lembaga keuangan Barat seperti IMF atau <i>World Bank</i> | | solidaritas ekonomi antarnegara. Hal ini sesuai dengan nilai Islam yang mendorong keadilan distributif dan kolaborasi untuk kesejahteraan bersama |
| 3 | <i>Contingent Reserve Arrangement (CRA)</i> | Meningkatkan ketahanan keuangan BRICS melalui mekanisme cadangan bersama untuk menghadapi krisis likuiditas atau gejolak moneter global. | Kestabilan (<i>istiqrar</i>) dan tanggung jawab kolektif | Sistem cadangan bersama menunjukkan prinsip tanggungjawab kolektif dan stabilitas ekonomi yang ditekankan dalam Islam, guna menghindari ketidakpastian (<i>gharar</i>) dan spekulasi yang merusak sistem keuangan |
| 4 | <i>Cross-Border Interbank Payment System (CIPS)</i> | Membangun sistem pembayaran alternatif terhadap SWIFT agar transaksi lintas negara lebih cepat, aman, dan efisien. | Efisiensi (<i>itqan</i>) dan keadilan transaksi | CIPS mencerminkan prinsip efisiensi dan keadilan dalam transaksi keuangan Islam karena menghindari hambatan yang menimbulkan ketidakadilan atau keterlambatan dalam pembayaran |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|--|
| | | | | antarnegara. |
| 5 | <i>Belt and Road Initiative (BRI)</i> | Mendorong konektivitas ekonomi global melalui investasi infrastruktur, perdagangan, dan kerja sama antarnegara | Kemaslahatan (<i>maslahah</i>) dan kerjasama (<i>ta'awun</i>) | BRI mencerminkan semangat kemaslahatan dan kerja sama lintas negara untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam pandangan Islam, kolaborasi semacam ini mendukung terciptanya kesejahteraan sosial-ekonomi global yang adil dan seimbang. |

Kerangka perbandingan analitis di atas menunjukkan bahwa setiap strategi dedolarisasi BRICS tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, kerja sama, dan stabilitas ekonomi merupakan refleksi dari tujuan Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Dengan demikian, upaya dedolarisasi BRICS dapat dinilai sebagai langkah menuju sistem keuangan global yang lebih inklusif dan berimbang, jika dijalankan sesuai prinsip etika ekonomi Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara strategi dedolarisasi BRICS dengan nilai-nilai ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa inisiatif dedolarisasi yang dijalankan melalui mekanisme seperti *Local Currency Settlement (LCS)*, *New Development Bank (NDB)*, *Contingent Reserve Arrangement (CRA)*, *Cross-Border Interbank Payment System (CIPS)*, dan *Belt and Road Initiative (BRI)* pada dasarnya merefleksikan upaya kolektif untuk menciptakan sistem keuangan global yang lebih adil, stabil, dan berdaulat. Secara konseptual, pandangan ekonomi Islam terhadap dedolarisasi BRICS menunjukkan bahwa langkah ini berpotensi memperkuat tatanan

ekonomi dunia yang lebih seimbang dan bebas dari dominasi satu kekuatan moneter.

Pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS dapat menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih berkeadilan antarnegara, sekaligus mendukung terciptanya perdagangan yang etis dan berlandaskan nilai kesejahteraan bersama. Dengan demikian, dedolarisasi dalam perspektif Islam bukan sekedar strategi ekonomi, melainkan juga langkah menuju sistem keuangan global yang lebih beretika, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip keuangan Islam yang menolak eksploitasi serta menekankan keseimbangan sosial-ekonomi.

Daftar Pustaka

- Astuty, S., Basmar, E., & Hasan, M. (2019). EKONOMI MONETER. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Bank Indonesia. (2020). Peraturan Bank Indonesia No. 22/12/PBI/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank. In *Peraturan Bank Indonesia*.
- Bank Indonesia. (2021). *Indonesia-Tionkok Memulai Implementasi Penyelesaian Transaksi Bilateral Dengan Mata Uang Lokal (Local Currency Settlement)*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2322721.aspx
- Bertaut, C., Beschwitz, B. Von, & Curcuru, S. (2021). The International Role of the U.S. Dollar. *Board of Governors of the Federal Reserve System*. <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-u-s-dollar-20211006.html>
- BRICS. (2009). *History of BRICS*. <https://infobrics.org/page/history-of-brics/>
- BRICS. (2024). Reinforcing Financial Stability: An Overview of the BRICS Contingent Reserve Arrangement (CRA). *BRICSTODAY*. <https://bricstoday.com/reinforcing-financial-stability-an-overview-of-the-brics-contingent-reserve-arrangement-cra/>
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in The Light of Maqashid al-Shariah. In *The International Institute of Islamic Thought* (15th ed.). https://doi.org/10.1007/978-3-030-93703-4_423-1
- China Economic Information Service. (n.d.). *Xinhua Silk Road*. <https://www.ceis.cn/en/list/xhsl/index.html>
- CIPS. (n.d.-a). *CIPS Introduction*. <https://www.cips.com.cn/cipsenmobile/7242/7256/34009/index.html>
- CIPS, C. I. P. S. (n.d.-b). *About CIPS*. CIPS, Cross-Border Interbank Payment System. Pada akhir tahun 2019, CIPS memiliki 33 Peserta Langsung dan 903 Peserta Tidak Langsung (dari 94 negara dan kawasan) dengan peningkatan masing-masing sebesar 74%²⁵ dan 413%²⁵ dibandingkan dengan tahun 2015. Melalui Peserta Langsung dan Tidak Langsung ini,

- D'Arista, J. (2004). Dollars, debt, and dependence: The case for international monetary reform. *Journal of Post Keynesian Economics*, 26(4), 557–572.
- Diah, D. (2023). Apa Itu Dedolarisasi? Ini Pengertian, Keuntungan, dan Kerugian yang Bisa Didapatkan Indonesia. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-dedolarisasi-ini-pengertian-keuntungan-dan-kerugian-yang-bisa-didapatkan-indonesia-825143>
- Enfu, C., & Chunyi, L. (2023). *Research on the Mechanism of Dollarization and De-dollarization under the Global Financialization System*. 5(1), 6–29.
- Federal Reserve Bank of Atlanta, S. K. G. (2013). *Creation of the Bretton Woods System*. <https://www.federalreservehistory.org/essays/bretton-woods-created>
- Handayani, L. N. (2018). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. PKEBS Universitas Gadjah Mada. <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-prinsip-ekonomi-islam/>
- Ilyinsky, A. I., & Magamedov, A. S. (2023). The Changing Role of the US Dollar in the Global Monetary System of a Multipolar World. *Review of Business and Economics Studies*, 11(2), 6–14. <https://doi.org/10.26794/2308-944x-2023-11-2-6-14>
- IMF, I. M. F. (2024). *World Economic* (Issue May).
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. In *An Introduction to Islamic Finance* (pp. 113–136). <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118390474.ch6>
- Ito, H. (2021). The Global Monetary System and the Use of Local Currencies in ASEAN+3. *RIETI Discussion Paper*.
- Kahn, M. J. (2011). The BRICs and South Africa as the Gateway to Africa. *Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy*, 111(7), 493–496.
- Kamil, M. A., & Muhammad Rasyid Ridlo. (2023). Dedolarisasi: Momentum Kebangkitan Dinar. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 220–230. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.6185>
- Kornitasari, Y., Nabeela, R. S., Ismail, M., & Manzilati, A. (2023). *PENGANTAR EKONOMI MONETER ISLAM*. UB Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=3K_BEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=P1&dq=Teori+Ekonomi+Moneter+Islam&ots=kaD7JSmfR8&sig=kFxx8X4L2uArlTZOejmi94Z9SQ4&redir_esc=y#v=onepage&q=Teori+Ekonomi+Moneter+Islam&f=false
- Kurniawan, A. (2024a). 3 Alasan BRICS Membuat Mata Uang Baru untuk Tandingi Dolar AS. *Sindonews*. <https://ekbis.sindonews.com/read/1464973/33/3-alasan-brics-membuat-mata-uang-baru-untuk-tandingi-dolar-as-1727658565?showpage=all>
- Kurniawan, A. (2024b). Sejarah Berdirinya BRICS, Blok Ekonomi Penantang Dominasi Barat. *Sindonews*. <https://ekbis.sindonews.com/read/1418963/33/sejarah-berdirinya-brics-blok-ekonomi-penantang-dominasi-barat-1721383650>
- Marzuki, S. N. (2018). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2), 201–216. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.7>
- New Development Bank. (n.d.). *New Development Bank: Projects*. Ndb.Int. <https://www.ndb.int/projects/>

- New Development Bank, N. (2022). *Annual Report 2022 - Building a leading development bank for emerging economies*. <https://www.ndb.int/annual-report-2022/>
- O'Neill, J. (2001). *Building Better Global Economic BRICs*. November 2001.
- Ohashi, H. (2018). The Belt and Road Initiative (BRI) in the context of China's opening-up policy. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 7(2), 85–103. <https://doi.org/10.1080/24761028.2018.1564615>
- Ozanne, B. (2024). *What Is CIPS? A Guide to China's Cross-Border Payment System*. Stratys.
- Rau's IAS Study Circle. (2024). New Development Bank. *Compass.Raiias*. <https://compass.rauias.com/current-affairs/new-development-bank/>
- Sari, Y., & Indrabudiman, A. (2024). Kebijakan Moneter Islam Dalam Upaya Mengendalikan Inflasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 621. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11938>
- Siddiqui, K. (2020). The U.S. Dollar and the World Economy: A Critical Review. *Athens Journal of Business & Economics*, 6(1), 21–44. <https://doi.org/10.30958/ajbe.6-1-2>
- Subramanian, A. (2011). *Living in the Shadow of China's Economic Dominance*.
- Swift. (n.d.). *Swift history*. Swift. <https://www.swift.com/about-us/history>
- Syaifulah. (2024). Analisis Potensi Mata Uang BRICS dalam Menantang Dominasi Dolar AS dalam Perspektif Ekonomi Moneter Islam: Keunggulan dan Tantangan. *Ejurnal.lainpare.Ac.Id*, 2(2).
- Tahkim, M. (2016). Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 51, 436–451.
- Teslya, G., & Podolskaya, T. (2020). Analysis of the Changing Role of Pound Sterling Within the International Monetary System. *The EUrASEANs: Journal on Global Socio-Economic Dynamics*, 4(4(23)), 39–44. [https://doi.org/10.35678/2539-5645.4\(23\).2020.39-44](https://doi.org/10.35678/2539-5645.4(23).2020.39-44)
- The Belt Council Information Office Of The People's Republic of China. (2023). *The Belt and Road Initiative: A Key Pillar of the Global Community of Shared Future*. <http://www.beltandroadforum.org/english/n101/2023/1010/c124-895.html>
- The People's Bank Of China. (2019, April 22). The Belt and Road Initiatives: Progres, Contributions, and Prospects. *The State Council Information Office*. http://english.scio.gov.cn/beltandroad/2019-04/22/content_76329624.htm
- TORONTO, U. of T. (2024). *Treaty for the Establishment of a BRICS Contingent Reserve Arrangement*. <http://www.brics.utoronto.ca/docs/140715-treaty.html>
- UnairNews, R. D. H. (2023). *Ekonom UNAIR Ungkap Alasan Dolar Amerika Jadi Mata Uang Dunia*. <https://unair.ac.id/ekonom-unair-alasan-dolar-amerika-jadi-mata-uang-dunia/>
- Wardhono, R. D. T. K., Hermawan, D., & Cahyaningtyas, D. (2023). *DAMPAK IMPLEMENTASI TRANSAKSI BILATERAL DENGAN MENGGUNAKAN UANG LOKAL TERHADAP REGULASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN DI SEKTOR KEUANGAN*.